



Indonesia PascaJawa

Hasil-hasil Simposium Peneliti Jokowi 1, 2, & 3

Fachry Ali

Hamdi Muluk • Aris Arif Mundayat • Manuel Kaisiepo

Eko Sulistyo • Siti Ruhaini • Asep Salahudin

Mukti Ali Qusyairi • Andi Zulkarnain

Editor: Arief Rosyid

INDONESIA PASCA-JAWA

MERIAL
BOOKS

INDONESIA PASCA-JAWA

Hasil-hasil Simposium Peneliti Jokowi I, II dan III

EDITOR:
Arief Rosyid

Diterbitkan atas kerjasama:
Suropati Syndicate dan Merial Books

Indonesia Pasca-Jawa:

HASIL-HASIL SIMPOSIUM PENELITIAN JOKOWI I, II, III

Editor: Arief Rosyid

Penata letak: Eko Arisandi & Danial Iskandar

Desain sampul: Danial Iskandar

Penerbit:

MERIAL BOOKS

PT. Merial Media Utama

Jl. Lapangan Ros Selatan No. 47 Tebet

Jakarta Selatan

Telpon: 021-22837347

Email: surat.merial@gmail.com

Cetakan pertama, November 2019

Hal cipta dilindungi undang-undang

© Arief Rosyid

Rosyid, Arief

Indonesia Pasca-Jawa: Hasil-hasil Simposium Penelitian Jokowi I, II, dan III/

editor: Arief Rosyid—cet. 1—Jakarta: Merial Books, 2019

xx + 164 halaman; 14,8 x 21 cm

ISBN.....

I. Ilmu Sosial II. Judul

III. Arief Rosyid

DAFTAR ISI

Pengantar	vii
-----------	-----

BAGIAN PERTAMA:

SIMPOSIUM PENELITIAN JOKOWI I:

FENOMENA POLITIK JOKOWI

- Membaca Fenomena Politik Melalui Jokowi
Fachry Ali 3
- Jokowi dalam Era Demokrasi: Paham Kuasa Jawa?
Aris Arif Mundayat 11
- Jokowi dan Prabowo di Mata Psikolog
Hamdi Muluk 29
- Keislaman Jokowi
Mukti Ali Qusyairi 35
- Fenomena Kepemimpinan Politik Joko Widodo
Andi Zulkarnain 53

BAGIAN KEDUA

SIMPOSIUM PENELITIAN JOKOWI II DAN III: JOKOWI PEMIMPIN PASCA-JAWA

- Indonesia Pasca-Jawa di Bawah Jokowi
Fachry Ali ————— 67
- Jokowi: Merintis Jalan Politik Indonesia Pasca-Jawa
Aris Arif Mundayat ————— 81
- Dinamika Integrasi-Simbolik dan Integrasi-Substantif di Indonesia: dari Jawa-Sentris menuju Indonesia-Sentris
Siti Ruhaini Dzuhayatin ————— 97
- Indonesia Pasca-Jawa: Pengalaman Papua
Manuel Kaisiepo ————— 122
- *Lamun Siro Sekti, Ojo Mateni*
Eko Sulistyono ————— 134
- Pasca-Sunda dan “Indonesia” yang Tak Kunjung Tiba
Asep Salahudin ————— 140
- Tentang Penulis dan Editor ————— 150

Dinamika Integrasi-Simbolik dan Integrasi-Substantif di Indonesia: dari Jawa-Sentris menuju Indonesia-Sentris

Siti Ruhaini Dzuhayatin

A. Pendahuluan: Indonesia dan Dinamika Pergulatan Etno-Religius Sentrisme

Bangsa adalah komunitas-komunitas terbangung atau 'sebuah bayangan tentang kebersamaan' (komunitas antropologis) yang ditransformasikan menjadi entitas yang diimajinasikan (*imagined*) sebagai komunitas politik yang bertujuan menyatukan berbagai kehendak dalam batas-batas kesamaan tertentu (Daniel Dhakidae, dalam Anderson, *Imagined Community*, 200: xxxii). Indonesia merupakan imajinasi tentang suatu bangsa yang diproklamlirkan pada 28 Oktober 1928 oleh para pemuda lintas suku, agama dan bahasa yang beragam. Proyek kebangsaan ini hendak menyatukan dalam suatu imajinasi: " Bertanah air satu, Tanah air Indonesia, Berbangsa satu Bangsa Indonesia dan Berbahasa satu Bahasa Indonesia". Tiga mantra ini merupakan "*the imagined nation*" yang mengikat orang dalam suatu wilayah yang tidak benar-benar saling tahu dan kenal tetapi diikat oleh apa yang disebut bangsa itu ada dalam kesadaran mereka (Benedict Anderson, 1993, 6-7).

Indonesia dan negara-negara pasca-kolonial merupakan entitas politik yang berbeda pada tradisi nation-state di Eropa, dimana suatu negara-bangsa dibentuk dari suatu ethno-religious centrism tertentu. Bangsa Perancis yang beragama Katolik mendirikan negara Perancis, Bangsa Dannish yang Protestan mendirikan negara Denmark, Bangsa Spanyol (Spanish) mendirikan negara Spain dan sebagainya. Ethno-religious centrism inilah yang menjadi akar tumbuhnya suatu negara bangsa. Homogenitas etnis dan agama menjadi akar yang kuat membentuk stabilitas kebangsaan modern di Eropa. Kebangsaan Amerika memiliki cerita yang berbeda meski memiliki fondasi kuat yaitu “White Anglo-Saxon Protestan “ (WAPs) yang relatif homogin pada awalnya dan menjadi “Cawan raksasa” menggodok ‘melting pot’ asimilasi menjadi satu bangsa.

17 Agustus 1945 merupakan proklamasi kemerdekaan “kenegaraan” (state) menandai berakhirnya dominasi politik kolonial atas “bangsa” Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1928 diatas Perbedaan *ethno-religious centrism* yang telah ada seperti bangsa Jawa, Sumatra, Celebes, Ambon dan sebagainya, pluralitas agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu serta puluhan kepercayaan asli serta keaneka-ragaman budaya yang berjumlah sekitar 700 jenis. Suatu bangsa boleh lahir meski berada dalam cengkeraman kolonialisme dan imperialisme. Kelahiran bangsa dan negara (nation-state) di bekas tanah jajahan yang kompleks dengan *ethno-religious centrism* yang kental banyak diragukan oleh para Orientalist awal abad 20 seperti JS Furnivall yang memprediksi negara di Asia dan Afrika hanya akan seumur jagung karena akan segera tercabik ketegangan dan konflik sentimen ethno-religius (Lee Hook Guan, 2009: 33). Ramalan Furnivall tidak berlebihan jika menengok tragedi Asia Selatan yang terbelah setelah di

proklamirkan sebagai negara India pada tahun 1947. Ketergangen etno-religius membelah negara-bangsa itu menjadi tiga dengan Pakistan dan Bangladesh. Pakistan yang dominan Punjabi Muslim menuntut pemisahan dari mayoritas suku Hindi yang Hindu. Pakistan merupakan manifestasi marjinalisasi etno-religius yang menjelma menjadi sentimen identitas kebangsaan. Namun homogenitas agama nampaknya juga bukan garansi bagi keutuhan suatu niat bersatu. Diskriminasi etnis Benggali menyulut perang kemerdekaan dan proklamasi Bangladesh pada tahun 1971.

Asia Tenggara menjadi 'test case' berikutnya bagi keberlangsungan suatu imaginasi negara-bangsa demokratis dalam kemajemukan premordial dan harus berjibaku kesetaraan dan kesejahteraan yang menjadi pertarungan rekatan kebangsaan. Diskriminasi primordial yang paling terasa adalah ketidak-setaraan simbolis kebangsaan, partisipasi politis dan publik serta ketidak-adilan pada keterjangkaun kesejahteraan. Negara Asia Tenggara yang kaya secara sumber daya alam adalah 'rahmat' yang dapat menopang rekatan kebangsaan meski dikemudian hari justru menjadi 'laknat' ketika korupsi, chauvinisme etnis-agama dan nepotisme merajalela. Hebatnya, sampai menjelang 75 tahun--suatu usia muda bagi suatu negara bangsa--negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat bertahan. Para Indonesianis generasi berikutnya justru membalikkan tesis Furnivall dengan menyaksikan bagaimana para elit-elit politik Asia -Tenggara lebih terampil mengelola perbedaan dan keberagaman dibandingkan para pioner-pioner negara bangsa di Eropa. Bahkan pada awal tahun 1970-1990an Singapura, Indonesia, Malaysia tercatat sebagai *the emerging countries* dan menjadi "Singa Asia Baru" disamping Jepang dan Korea

Selatan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan, diatas kebangkrutan ekonomi dan kemiskinan sosial yang ditinggalkan para penjajah (Robert Hefner, 2001: 2-3). Keruntuhan negara-bangsa justru terjadi di kawasan Balkan dan Uni Sovyet dan keruntuhan tembok Berlin sebagai supremasi negara-negara sosialis pada awal 1990an yang membawa pengaruh besar terhadap konstelasi politik global.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Tenggara, negara-negara ini menjadi semacam 'laboratorium' studi-studi agama dan budaya disandingkan dengan kemerosotan pamor Timur Tengah sebagai pusat Peradaban Keagamaan dengan kecamuk konflik Palestina-Israel, Revolusi Iran serta menguatnya kelompok-kelompok garis keras—terutama kelompok-kelompok Islam—sebagai mayoritas penduduknya. Meningkatnya pendidikan membawa kesadaran baru yang pada gilirannya bersitegang dengan penguasa yang memicu perlawanan dalam gerakan "Arab Spring", baik secara ke dalam maupun ke luar. Marginalisasi selalu menguatkan sentimen primordial, apakah etnisitas ataupun agama, baik secara perlawanan fisik seperti Hisbullah, al-Qaida, Jama'ah Islamiyah dan sejenisnya maupun kontestasi narasi politik dan keagamaan seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Gerakan semacam itu bukan semata terjadi di Timur Tengah tetapi Filipina, Indonesia dan Thailand juga terkena imbas gerakan menumbangkan otoritarianisme Marcos, Suharto serta beberapa Perdana Menteri di Thailand. Gerakan moral keagamaan di Filipina mampu merobohkan kekuasaan diktator Ferdinand Marcos selama puluhan tahun dan demikian pula gerakan masyarakat sipil di Indonesia memaksa Suharto lengser setelah berkuasa selama 30

tahun dalam terpaan krisis ekonomi terburuk yang melanda kawasan Asia-Tenggara (Micheal T Rock, 2016: 48)

Dalam dinamika tersebut, kepemimpinan Indonesia berlangsung silih berganti antara pimpinan sipil dan militer dengan corak politik, nuansa budaya serta narasi kebangsaan yang beragam pula. Masa Soekarno-Hata dengan corak politik integratif-simbolik, masa Suharto yang militeristik dengan mengutamakan stabilitas dan modernisasi dan setelah Era Reformasi corak kepemimpinan nasional silih berganti menghadapi tantangan demokratisasi, keutuhan Indonesia, tekanan global serta kesejahteraan ekonomi. Dari proses suksesi yang berlangsung hampir 75 tahun, masih sangat dirasakan dominasi etno-religius dari Jawa dan Islam yang cukup dominan. Sangat lumrah terjadi bahwa etnis dan agama yang terbesar umumnya menjadi semacam *macro-culture* suatu negara, baik secara dominatif maupun secara hegemonik (David L Thronton, 1972). Hampir semua presiden Indonesia adalah Jawa dan Islam, kecuali BJ Habibie yang berayah dari Gorontalo tetapi ibunya beretnis Jawa dari Yogyakarta. Ini lah yang menjadi semacam 'adagium' bahwa hanya orang Jawa dan Islam yang dapat menjadi presiden Indonesia. Begitu juga yang terjadi di Amerika dimana terpilihnya Barak Obama yang berkulit hitam dianggap sebagai 'breaking the glass ceiling' Presiden Amerika yang Anglo Saxon, Putih dan Protestan. Banyak orang mengkhawatirkan bahwa Obama tidak akan selamat seperti Jhon F Kennedy yang terbunuh—salah satunya diyakini karena ia beragama Katolik.

Pergantian kepemimpinan di Indonesia, bagaimanapun, memiliki jejak-jejak kontestasi, negosiasi dan bahkan harmonisasi dari tarikan etno-sentrisme serta kepentingan

nasional dari masa ke masa dan berkontribusi terhadap eksistensi Indonesia dengan segala tantangannya, tidak terkecuali Presiden Joko Widodo atau yang lebih populer dipanggil “Jokowi”. Sangat penting untuk dapat menelusuri jejak pada pemimpin dalam proses apa yang di sebut ‘Indonesia in the Making’ sebagai berikut:

B. Orde Lama, Sukarno dan Integrasi-Simbolik Indonesia: Indonesianisasi Jawa

Rentangan rezim politik Orde lama berawal sejak kemerdekaan sampai turunnya Sukarno sebagai Presiden pada tahun 1966. Dinamika politik yang paling rumit, kompleks dan paradoks pada masa awal pertumbuhan bangsa ini. Kontestasi ideologis yang paradoks antara Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan keniscayaan NASAKOM, pergumulan politik presidensial dan parlementer serta rivalitas partai agama dan partai sekuler nasionalis menjadi memori historis yang kaya dan berharga meski mengandung kegetiran yang sampai saat ini masih belum dapat drekonsiliasi.

Meski demikian, awal proses politik ini mampu meletakkan fondasi kebangsaan yang kokoh sampai saat ini yaitu ‘Integrasi-Simbolik’ yang membentuk jati diri bangsa yang kuat dari rasa senasib-sepenanggungan derita penjajahan yang disatukan dalam suatu geo-politik Hindia-Belanda (*Dutch Hindi*) menjadi Indonesia dalam memori kolektif kejayaan Nusantara. Dalam proses ‘*nation in the making*’ Pulau Jawa menjadi epicentrum gerakan kebangkitan nasionalism yang dimotori para mahasiswa dari berbagai penjuru wilayah Hindia-Belanda seperti Minangkabau, Batak, Bugis, Ambon, Minahasa sehingga

cita-cita Kebangsaan (*nation*) pada tahun 1928 dan deklarasi kenegaraan (*state*) tidak semata mereinkarnasi kejayaan kerajaan-kerajaan terdahulu. Sangat menarik menelaah proses ke bangsaan dan kenegaraan ini terjadi di suatu wilayah kerajaan Yogyakarta yang bukan menjadi wilayah kolonial dan bahkan rajanya sendiri ikut menjadi pelopor kemerdekaan negara bangsa yang disebut Indonesia serta segera bergabung menjadi bagian istimewa dalam hitungan bulan saja. Seolah kerajaan 'nasionalis' ini sengaja tidak dileburkan secara bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 demi menjaga 'safe-zone' ketika negara baru ini masih sangat rentan terhadap pengambil-alihan kembali oleh pemerintah kolonial. Pemerintahan seumur jagung ini harus bekerja di pengasingan di Jogjakarta pada peristiwa yang dikenal dengan agresi militer (1947-1949) dan Sultan Hamengkubuwono IX menjadi bagian dalam perjanjian meja bundar dalam pengembalian kedaulatan negara Indonesia.

Di balik perjuangan yang rumit dan kompleks ini berlangsung proses Indonesianisasi Jawa, utamanya Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya dengan munculnya tokoh-tokoh kemerdekaan yang multi etnis dan multi agama. Narasi keindonesiaan begitu kuat dan gaung nasionalisme itu menyebar ke pulau-pulau lain mesti teknologi informasi masih sangat sederhana. Inilah kekuatan narasi bangsa dari *the imagined community* yang melahirkan tokoh-tokoh, bukan semata-mata politis tetapi ideolog besar seperti Sukarno, Hatta, Muhammad Yamin, Sutan Syahrir, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Ahmad Dahlan, SK Trimurti, Rasuna Said, Kiai Hasyim Asy'ari, Sutomo, Douwes Dekker dan yang lainnya. Di sinilah narasi kuat itu membentuk imajinasi kebangsaan sebagai realitas hidup yang sangat berharga

untuk diperjuangkan menjadi faktor perekat integrasi meski bekerja secara simbolik dengan agitasi-agitasi mimbar, lagu-lagu perjuangan, karya-karya sastra dan nasionalisasi narasi-narasi perlawanan lokal seperti Cut Nyak Din, Diponegoro, Pattimura, Martina Teahahu, Nyai Ageng Serang, Sultan Hassanuddin, Kartini, Sam Ratulangi, Jenderal Sudirman, Bung Tomo dan yang lainnya. Integrasi simbolis bersinergi dengan perlawanan fisik mengantarkan pada Kemerdekaan Indonesia yang dipandang sebagai pintu gerbang suatu integrasi substantif yang menjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan yang terasa hanya mimpi di tanah jajahan.

Faktor integrasi-simbolis yang dibentuk oleh dua aspek diatas tetap menjadi fondasi kokoh walau mengalami kegaduhan politis dari tokoh-tokoh yang membidaninya. Kepentingan partai nyaris membelah Indonesia dalam usianya yang muda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Republik Indonesia Serikat (RIS), sistem perlementer, dekrit Presiden. Ditambah lagi gerakan separatis diberbagai wilayah bercorak sentimen etno-religius seperti kekhawatiran Furnivall. Ada semacam mukjizat bahwa turbulensi politik tersebut tidak sampai meretakkan fondasi kebangsaan. Banyak kalangan seperti Robert Hefner mengagumi betapa 'integrasi-simbolik' ini dapat bertahan. Ia memberi 'clue' tentang mengalirnya mentalitas moderat dan toleran hasil dari proses akulturasi dan inkulturasi agama, termasuk Islam berabad-abad dari letak geografis yang strategis dalam pertukaran budaya (Robert Hefner, 2000). Mentalitas tersebut memudahkan mereka yang berada pada wilayah ini menemukan 'titik temu' pada pertikain-pertikaian dari keragaman dan perbedaan. Umumnya mereka dapat 'berbagi' untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Pancasila dan utamanya, Sila

Pertama merupakan cerminan ‘titik temu’ yang mendamaikan ketegangan tentang landasan negara dalam kebhinnekaan dan kemajemukan. Namun mentalitas tersebut bukan tanpa godaan dari iming-iming ‘keistimewaan’ mayoritas seperti keniscayaan negara Islam dan memberlakukan Syari’ah.

Masa-masa formatif kebangsaan yang bergolak ini berakhir dengan akhir dari kepemimpinan Presiden Sukarno yang disebut ‘Orde Lama’ dengan krisis yang melanda secara multi-demensial. Namun setidaknya, masih ada secercah harapan untuk melanjutkan ikatan imajinatif ‘integrasi-simbolis’ menuju langkah ‘integrasi-substantif’ melalui perbaikan taraf kehidupan bangsa merdeka ini.

C. Orde Baru: Suharto- Integrasi-Substantif dan Bayang-Bayang Jawanisasi Indonesia

Orde Baru menandai kepemimpinan baru Indonesia dibawah Presiden Suharto dengan corak kepemimpinan yang sentralistik-militeristik ketika kepemimpinan sipil dipandang gagal membawa janji kemerdekaan. Namun tidak mudah mencari sintesis antara demokrasi liberal multi-partai dengan demokrasi terpimpin poros terbatas Nasionalis-Agama-Komunis (NASAKOM) ditengah krisis multi-dimensial (W.F Wertheim, 1999: 278). Kehadiran Orde-Baru dengan kebijakan kemakmuran ekonomi disambut luas oleh rakyat yang kelelahan terombang-ambing turbulensi politik dan ideologi. Dengan sangat cepat rakyat dapat menikmati hak-hak dasar seperti pangan, pangan dan sandang meski mereka tidak terlalu kritis dengan bagaimana proses pemenuhan dilakukan. Kehadiran Bank Dunia bak ‘dewi-penolong’ dalam memajukan

pertanian dan kecukupan pangan, pendidikan bahkan penguatan sektor ekonomi makro.

Pada dua dasawarsa pemerintahan Orde Baru, masyarakat Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan dengan mengelola sumber daya alam yang masif sehingga dijuluki 'macan baru Asia'. Indonesia menjelma menjadi bangsa modern, baik dari segi pendidikan dan gaya hidup urban kelas menengah diberbagai pusat-pusat perbelanjaan, hiburan, industri otomatis dan pelesiran. Kemudahan ini ditopang dengan sektor ekonomi canggih dengan sistem perbankan serta kebijakan fiskal modern. Bagi generasi yang mengalami peralihan dari Orde-Lama menuju Orde Baru, Presiden Suharto adalah 'ikon' dan idola. Jika Presiden Sukarno dinobatkan sebagai "Bapak Proklamator " maka Presiden Suharto adalah "Bapak Pembangunan" yang dibuatkan film, monumen, lagu dan narasi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah dan perkampungan. Suharto nyaris menjelma menjadi " Benevolent Dictator" yang dipuja seperti Kemal Attaturk dari Turki.

Kebijakan investasi asing yang pada awalnya dimaksudkan sebagai proses transfer pengetahuan dan alih teknologi pada akhirnya justru menjadi kebijakan permanen yang mengharuskan pemerintah menerapkan pendekatan stabilitas dan keamanan. Gejolak politik dan sosial dimasa lalu kerap kali mengandung daya hancur yang destruktif dan 'amok' – kosakata asing yang konon diserap dari peristiwa-peristiwa gerakan massa yang destruktif – mengamuk—dari wilayah Nusantara yang dikenal sangat halus, moderat dan cinta damai. Ada endapan emosi yang berakar dari *ethno-religious sentiment* yang dahulu sangat efektif membakar semangat perlawanan pada penjajah. Di

masa lalu istilah pribumi dan bahkan 'Islam' seperti Sarekat Islam (SI) lebih menonjolkan aspek identitas politis ketimbang agama melawan penjajah sehingga H Samanhudi dan HOS Cokroaminoto pun merasa lebih nyaman disebut sebagai tokoh pribumi daripada tokoh agama (Deliar Noer, 1973: 106-107). Meski demikian, ada energi agama yang disebut ' nahi mungkar' (mencegah kemungkaran) yang berpotensi menjadi energi yang membakar emosi keagamaan karena menjadi bagian dari ajaran agama yang berkonsekuensi dunia-akherat, inti perlawanan yang sulit dipatahkan oleh janji apapun.

Stabilitas dan keamanan diterjemahkan dengan kendali terpusat secara sentralistik dan holistik dalam kosmologi Jawa yang sangat dihayati oleh Suharto yang berada dalam lingkaran priyayi Jawa ningrat. Berbeda dengan Sukarno yang dibesarkan dalam tradisi priyayi profesional dimana ayahnya adalah seorang guru terpandang sehingga menumbuhkan kritis yang skeptis-kritis dan revolutif. Suharto lebih bersifat moderat dan evolutif yang sejiwa dengan nafas developmentalisme. Pada masa inilah Indonesia secara simbolis, struktural dan kultural menjadi ter' jawa' kan. Belum pernah terjadi hegemoni simbol-simbol Jawa yang masif seperti pakaian nasional perempuan: kebaya dan konde, belum lagi gestur serta non-verbal expression yang 'njawani'. Secara kultural, konsep patron-client Jawa sangat terasa dalam birokrasi dan bergulir dalam kehidupan masyarakat yang anti-kritik sehingga menumpulkan kritik-konstruktif yang sebenarnya diperlukan.

Secara struktural tata-kelola Jawa seperti Kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, dusun, rukun tetangga, rukun warga diterapkan seluruh Indonesia dengan menafikan tata-

kelola masyarakat yang sudah ada seperti nagari di Sumatera Barat dan bentuk-bentuk serupa di daerah-daerah lain. Masyarakat dikelola secara seragam dengan Program Kesejahteraan Keluarga yang mengacu pada standar keluarga inti priyayi Jawa dengan kontrol berjenjang dari keluarga, RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Yang paling dirugikan adalah perempuan bekerja yang mengalami beban ganda dengan doktrin PKK tersebut dan banyak dikritik oleh para pegiat kesetaraan gender. Stabilitas harus dimulai dari keluarga yang berencana, baik jumlah anak maupun ketahanan ekonomi dan sosialnya. Keluarga yang stabil akan membentuk masyarakat yang stabil, saling bergotong-royong dan bermusyawarah. Secara struktural stabilitas diciptakan dengan mewajibkan semua pegawai negeri untuk netral dan tidak berpolitik, partai politik disederhanakan dan sekaligus dikontrol demi menjaga stabilitas. Pancasila digunakan sebagai indoktrinasi kepatuhan sosial dan menekan daya kritis individu. Program pemerataan dan pemindahan penduduk atau dikenal dengan program transmigrasi yang tidak dibarengi dengan proses asimilasi yang baik, dipandang oleh penduduk setempat sebagai proses Jawanisasi masif dan terstruktur. Disamping itu, beberapa gejolak yang disebut 'gerakan ekstrim kanan yang dikaitkan dengan agama dan ekstrim kiri yang distigmakan pada Partai Komunis Indonesia serta gerakan kedaerahan yang memuncak di Aceh dan Papua yang didekati secara keamanan militeristik.

Pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya menjanjikan kemakmuran, mengalami anomali dan kemerosotan dengan maraknya korupsi, nepotisme dan penyalahgunaan hutang luar negeri sehingga menciptakan keresahan sosial yang menggeliatkan pemikiran kritis para intelektual dan aktifis pro-demokrasi ditengah tekanan stigmatisasi maupun

ancaman keamanan. Anomali tersebut semakin memperlebar kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa yang membunyah pada puncaknya dengan gerakan reformasi yang menumbangkan 30 tahun kepemimpinan Suharto dan Orde Baru yang seharusnya memiliki peluang dan kesempatan besar memperkuat ikatan kebangsaan 'integrasi-simbolis' membuka gerbang kemerdekaan menjadi ikatan 'integrasi-substantif' dalam mengisi kemerdekaan serta mengantarkan bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia.

Turbelensi politik berulang lagi dengan pola yang hampir sama, otoritarianisme, krisis ekonomi dan tindakan represif menjadi sumbu yang meledakkan gerakan perubahan destruktif yang meminta puluhan dan bahkan ratusan korban. Suharto meninggalkan kebangkrutan ekonomi seperti sebelumnya dengan bayang-bayang separatisme dua wilayah terjauh: Papua di ujung timur dan Aceh diujung Barat. Sekali lagi ikatan 'integratif' kebangsaan di uji setelah sebelumnya dunia menyaksikan keporak-porandaan Balkan dan keruntuhan negara besar yang seakan ' mustahil' terjadi Uni Sovyet di awal 1990an. Para pengamat Indonesia was-was : mampukah Indonesia keluar dari kutukan Furnivall karena masalah ketidakadilan dan koyakan sentimen etno-religious karena hilangnya perekat mozaik kebhinekaan bangsa yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial?

D. Era Reformasi: Harapan Integrasi Konektifitas dan Bayang-bayang Disintegrasi

Era Reformasi menandai supremasi sipil diatas otoritarianisme militer dengan ditanggalkannya 'dwi fungsi ABRI' menjadi Tentara Nasional Indonesia yang profesional,

amandemen berulang kali Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan Presiden dan eksekutif serta pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. Membuka kebebasan pers serta jaminan hak ekspresi dan berasosiasi yang lebih luas. Uforia ini melahirkan berpuluh partai politik berbagai aliran, terutama dengan munculnya partai berbasis agama seperti Partai Keadilan Sejahtera yang berbasis Islam dan Partai Damai Sejahtera berbasis Kristen, partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta afiliasi-afiliasi lainnya. Disamping itu, banyak bermunculan kelompok keagamaan yang selama Orde Baru ditekan dengan stigma ekstrim kanan serta kelompok-kelompok yang diasosiasikan ekstrim kiri. Indonesia menikmati alam demokrasi yang sesungguhnya dan berhasil menyelenggarakan pemilu jujur dan adil yang banyak dipuji oleh pengamat pemilu luar negeri. Otoritarianisme sentralistik telah mendesak diadakannya desentralisasi dan otonomi daerah sebagai mekanisme pemerataan kesejahteraan di daerah.

Pembatasan kepemimpinan nasional yang hanya dua periode tidak memungkinkan lagi terjadinya otoritarianisme seperti dimasa lalu. Akibatnya kepemimpinan silih berganti, terutama pada enam tahun pertama dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarnoputri dan mulai stabil pada tahun 2004 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudoyono sampai dengan tahun 2014. Disamping “PR” membenahan ekonomi, bayangan resesi ekonomi global serta uforia otonomi daerah yang melahirkan ‘raja-raja lokal’ atas nama prioritas “putera-daerah” berpotensi mendiskoneksi ikatan integratif kebangsaan yang belum sepenuhnya solid. Masa ini juga diperparah konflik horisontal bermotif agama, baik dalam skala kecil seperti persekusi kelompok minoritas seperti

Ahmadiyah dan Syi'ah sampai konflik berdarah yang masif di Ambon, Maluku Utara dan Poso, daerah-daerah yang sebelumnya memiliki reputasi kerukunan umat beragama yang kuat, bahkan telah berabad lamanya. Kekerabatan di Ambon dengan perbedaan agama sangat lazim di temui di sana dan dapat hidup dengan harmonis dan damai. Belum lagi menguatnya kelompok radikal atau ekstrim dengan kekerasan (*violent extremism*) dengan tren baru menggunakan modus Bom Bunuh diri dengan sasaran orang asing dan anggota kepolisian. Kelompok ini ditengarai memiliki hubungan gerakan dengan kelompok-kelompok trans-nasional yang berkehendak mewujudkan 'khilafah Islam Raya' dan berperang melawan dominasi Barat seperti kelompok al-Qa'ida, Jama'ah Islamiyah, Jama'ah Asyrotu Tauhid serta gerakan-gerakan lokal yang ingin menegakkan Syariah Islam seperti Laskar Jihad, Forum Persatuan Umat Islam (FPUI) maupun Front Pembela Islam dan segala variannya.

Aspek paling krusial yang segera direspon oleh pemerintah adalah tuntutan otonomi daerah atas nama pemerataan pembangunan yang jika tidak ditangani dengan seksama akan menjerumuskan Indonesia dalam kutukan Furnivall. Namun, sekali lagi, kutukan tersebut diantisipasi sangat cerdas oleh para perancang otonomi daerah yang tidak meletakkannya pada tingkat provinsi melainkan di daerah tingkat dua dengan tetap mengalokasikan masalah-masalah strategis negara pada pemerintah pusat, yaitu pertahanan, ekonomi dan agama. Pembentukan provinsi di Indonesia itu hampir serupa dengan negara-negara di Eropa yang dibangun berdasarkan etno-religius. Pada mulanya skema itu mendapatkan kritik dari banyak pengamat karena kurang memungkinkan terjadinya kemandirian daerah karena terlalu kecil otoritasnya tetapi 'momok' disintegrasi

lebih mengemuka sebab peluang konsolidasi politik identitas etno-religius lebih mudah dilakukan. Tidak berlebihan sebab lepasnya Timor-Timur karena tetap menjadi 'trauma' disintegrasi karena pada saat ini suatu negara tidak dapat mengisolasi masalah nasional dengan mengabaikan tekanan internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai saat ini hubungan luar negeri Indonesia masih terus dibayangi oleh peninjauan status Papua dan Aceh di forum-forum internasional.

Pemberantasan korupsi adalah deretan tuntutan Reformasi yang tidak mudah dilaksanakan meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat galak menghadang para koruptor. Politik transaksional luput dari antisipasi reformasi sistem pemilu langsung yang membuka celah korupsi yang jauh lebih masif dari sebelumnya. Sulit bagi pemerintahan pada waktu itu untuk menciptakan stabilitas tanpa kompromi-kompromi dan, celaknya, kompromi yang dilakukan adalah 'thousand friends and zero enemy' – termasuk meng 'entertain' kelompok-kelompok pro-Syaria'ah yang punya tabiat turun ke jalanan dan menciptakan 'gegar' sosial. Inilah cara aman mencapai stabilitas non-militeristik sebab isu-isu kompleks akan murah merebut simpani publik untuk menggoyang reputasi pemerintah. Sama dengan Suharto pada awal kepemimpinannya, SBY sebenarnya memiliki modal politik yang besar yang dapat melakukan berbagai gebrakan mengembalikan gerbong reformasi pada relnya. Sayang sekali politik 'merangkul banyak teman' ini tanpa disadari memberi jalan mulus pada 'gerakan-gerakan' beraliran Syalafi-ideologis yang dikenal pro-Syariah ini semakin menguat menyusup ke berbagai relung kehidupan bangsa: kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi dan mengalamipenyebaran yang masif dan eskalatif dengan

canggihnya teknologi sosial media yang mampu mengorbit da'i dan ustadz selebritis yang tidak mengakar kuat di organisasi-organisasi sosial-keagamaan arusutama seperti Muhammadiyah, NU serta sejenisnya yang bercorak moderat dan adaptatif.

Popularitas mereka dilambungkan oleh kegamangan masyarakat menghadapi krisis yang berkepanjangan sementara korupsi, kolusi dan nepotisme belum nampak terkikis sehingga mereka membutuhkan 'jangkar' untuk memperantairi katarsis kolektifnya. Ormas arusutama yang mengedepankan 'amar ma'ruf' (berbuat kebaikan) dirasakan tidak terlampaui keras menyuarakan katarsis tersebut sehingga mereka perlu kelompok-kelompok yang meneriakkan 'nahi munkar' (mencegah kemungkaran) yang sayangnya direduksi dalam agenda-agenda politis Islamisasi ala Ikhwanul Muslimin dan Hizbu Tahrir yang membawa kegetiran Timur-Tengah melalui para dai-dai lulusannya. Skenario *zero enemy and thousand friends* ini nampak ampuh meredam gejolak sosial, setidaknya, sampai SBY menyelesaikan periode keduanya dan digantikan oleh Joko Widodo, sosok fenomenal yang di gadang-gadang menjadi presiden karena debut kariernya yang melejit dari walikota Solo yang belum sempat selesai karena menang dalam pemilihan Gubernur DKI. Banyak orang menaruh harapan bagi Indonesia Baru karena ia seperti 'satrio piningit' yang bukan lahir dari keluarga elit partai, bukan dari elit miiter dan bukan dari kalangan konklomerat. Kepemimpinannya memikat hati dari keberhasilannya menyulap Solo menjadi kota yang layak tinggal, ramah dan aman.

E. Joko Widodo: Keniscayaan Integrasi-Konektifitas & Bayang-Bayang Polarisasi

Pemerintahan Joko Widodo menyiratkan harapan baru terhadap kesejahteraan substantif dengan berbagai terobosan kebijakan ekonomi dan yang paling fenomenal adalah kebijakan infrastruktur yang masif dan relatif merata. Dengan Nawacitanya Jokowi menyuarakan ‘pembangunan dari pinggiran yang selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Inilah cerminan dari integrasi-konektifitas yang belum terwujudkan setelah kemerdekaan. Ini bertentangan dengan kebijakan pendahulunya yang lebih berfokus pembangunan di pusat-pusat ekonomi strategis di Indonesia, umumnya di wilayah bagian Barat. Konsekuensinya wilayah Timur tertinggal secara ekonomi dan sekaligus menjadi daerah dengan komoditas mahal sehingga menciptakan kesenjangan yang mudah mengikis ikatan kebangsaan. Oleh sebab itu, konsep pembangunan dari pinggiran memberikan harapan bagi proses pemerataan integrasi-substantif dan sekaligus menguatkan konektifitas ikatan tersebut.

Bagi Jokowi, retorika integrasi-simbolis bangsa ini telah mengalami ‘over-dosis’ dari sejak kemerdekaan namun tidak cukup kuat bertahan dari arus revousi indutri baru yang disebut relovusi 4.0 yang lebih bersifat ‘memenuhan’ kebutuhan dasar yang nyata seperti lapangan pekerjaan, aksesibilitas dan mobilitas dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, prioritas utama pemerintahannya adalah mengejar ketertinggalan infrasturktur yang memungkinkan akselerasi revolusi terkini. Menurutnya, Indonesia telah tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga dalam hal aksesibilitas sebagai prasyarat mobilitas, efisieansi dan efektifitas dalam

relovisi ini yang di dasarkan pada prinsip ‘kecepatan dan efisiensi’.

Dengan menggunakan logika pembangunan yang sederhana dan pragmatis bahwa ketersediaan Infrastruktur akan memperlancar distribusi komoditas dan menekan biaya sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terjangkau dan terpenuhi. Yang paling menjadi prioritasnya adalah daerah terluar, terpencil dan tertinggal (3T) yang selama ini paling tidak merasakan hasil pembangunan karena lebih difokuskan di wilayah sekitar pemerintahan pusat. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang ‘menyimpan’ daerah 3T sebagai ‘buritan’ bangsa ini, Jokowi justru menempatkannya sebagai ‘beranda’ depan yang harus rapi. Belum lagi cerita-cerita pilu dari perbatasan dimana alat pembayaran menggunakan uang dari negeri jiran yang secara simbolis merefleksikan keterpinggiran yang nyata.

Namun demikian, pemikiran pragmatis ini hanya menjadi “entry-point” dari pandangan filosofisnya mendalam tentang kebangsaan yang banyak ‘diabaikan’ oleh pemimpin sebelumnya yaitu infrastruktur sebagai ‘penghubung’ rasa kebangsaan yang hakiki—bukan sekedar yang diimajinasikan. Dimasa lalu, pada saat teknologi informasi belum secanggih saat ini, kepentingan elektoral membangun ‘daerah gemuk suara’ masih dapat dilakukan tetapi dengan deras dan sangat terbukanya teknologi sosial media mustahil niatan semacam itu diwujudkan. Disamping itu, rezim internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa makin kaya instrumen memantau implementasi hak-hak asasi, termasuk hak politik dan hak sosial-ekonomi sebagai cara untuk menyuarakan ‘hak menentukan nasib sendiri’ atau dikenal dengan *right for self determination*,

salah satunya adalah jika terjadi diskriminasi yang umumnya bersifat akumulatif geografis, etnis dan ras (Mark & Clapham, 2005: 290).

Di samping infrastruktur sebagai ‘jembatan penghubung’ keterpisahan geografis serta kekhasan budaya, Jokowi secara riil merepresentasikan keragaman ini lewat pakaian-pakaian daerah secara bergantian yang dikenakannya pada acara-acara resmi kenegaraan ataupun dalam kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang jarang dikunjungi pemimpin sebelumnya atas alasan keamanan. Demikian pula penggunaan filosofi-filosofi dari berbagai budaya dalam pidato kenegaraan dan acara-acara penting sehingga kebhinekaan tersebut mengarusutama dalam pentas nasional yang mampu menguatkan perasan bersatu.

Kebijakan integrasi-substantif dari pinggir menuju ke tengah juga mendapatkan kritik dari para pegiat HAM dan pluralisme, terutama terabaikannya issue intoleransi dari kelompok-kelompok baru yang berkembang kurang lebih 15 tahun lalu. Kelompok ini sangat intensif menggunakan kecanggihan teknologi informasi seperti internet, sosial-media dan sejenisnya untuk menggalang kekuatan agama dalam kontestasi politik. Banyak pengamat menengarai bahwa Jokowi hanya menuai proses pembenihan kelompok-kelompok yang kemudian di sebut sebagai ‘pro-Syariah’ dengan ciri skriptualis, menggunakan simbol agama, populis serta menggunakan cara –tekanan massa’ dalam memaksakan kehendak. Alam demokratisasi pasca-Reformasi membuka jalan kebebasan, termasuk kebebasan untuk menyuarakan ‘politik khilafah’ yang diusung oleh kelompok Hizbu Tahrir Indoneia (HTI) dan sejenisnya serta kelompok-kelompok yang memaksakan ‘implementasi

Syariah' dengan mengembalikan tujuh kata yang dulu di'hapus' dalam piagam Jakarta.

Banyak desakan dari berbagai pihak agar Jokowi mengambil langkah tegas membubarkan HTI walaupun muncul juga penolakan, termasuk para pegiat hak asasi manusia. Mereka menuntut adanya proses peradilan sebab pembubaran melalui Perpu dapat menjadi preseden kembalinya otoritarianisme. Kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok (Basuki Cahaya Purnama) Gubernur DKI (BBC News, 2017) menjadi 'turning point' revivalisme 'sentimin etno-religius' yang memunculkan politik identitas dan politik agama antara: Islam dan kafir, Islam dan demokrasi, Islam dan kebaya dan sebagainya yang bermuara pada keterbelahan yang bersifat oposisi biner dunia dan akhirat. Yang mengejutkan dan terus menjadi kajian adalah dukungan kelas menengah di kota-kota besar dan bahkan instansi pemerintah dan BUMN. Pendidikan tinggi dan kondisi ekonomi yang memadai tidak mampu membangun suatu pemahana rasional dan kritis terhadap interpretasi agama.

Inilah tantangan terbesar Jokowi antara mewujudkan integrasi-substantif guna mencegah disintegrasi tetapi justru disintegrasi tersebut muncul dari sumber lain yang ironisnya berada pada 'wilayah gemuk' suara pemilu . Oleh sebab itu, Jokowi nampaknya menerapkan kombinasi akomodasi-represif yang seolah bertentangan. Aspek penting dari pendekatan akomodatif inilah yang mampu menahan gerakan populis ini menyentuh 'memakzulan' yang secara teoritis tidak memungkinkan tetapi secara politis menyisakan celah—yaitu *people power*. Menghadapi berseri-seri demonstrasi yang dimobilisir kelompok skriptualis yang tidak mengakar pada organisasi arusutama

NU dan Muhammadiyah cukup dilematis dan riskan. Banyak kalangan meragukan bahwa Jokowi akan mampu menghadapinya tetapi dengan gaya kepemimpinan ‘terjangkau’ yang membawa sukses cepat dari walikota Surakarta , gubernur DKI maka Jokowi dapat melewati tantangan tersebut.

Pendekatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter kepemimpinan Jokowi yang tidak mengikuti ‘pakem’ sebelumnya yang berlatar belakang elit Jawa, elit militer, elit partai elit agama. Jokowi adalah ‘orang biasa’, pengusaha biasa dan rakyat biasa yang terbiasa mengedepankan harmoni dan kebersamaan sehingga melampaui ego-elitis tentang harga diri dan kekuasaan. Oleh sebab itu, ia mendatangi para demonstran meski cukup riskan dalam nalar umum dan mampu melokalisir gerakan tersebut. Namun ia cukup tegas memerintahkan penegak hukum untuk memproses pihak-pihak yang menyebarkan kebencian, hoax, fitnah dan hinaan, bukan pada dirinya tetapi pada lembaga kepresidenan yang perlu di junjung tinggi kehormatannya. Ia lebih sering mengabaikan fitnah dan hinaan yang ditujukan secara pribadi, termasuk yang dilontarkan oleh para lawan politiknya. Tidak mudah dilakukan jika Jokowi bukan orang biasa. Sikap itulah yang mengantarkannya pada kemenangan periode kedua ditengah polarisasi sosial yang meluas melampaui preferensi politik yang seharusnya surut pasca-pemilu namun pada kenyataannya meluas menjadi isu Islam dan nasionalisme yang dikuatirkan sampai tingkat akar rumput.

Masih terkait pandangan holistik keindonesiaan yang integratif, Jokowi merupakan sosok yang paling berani mewujudkan impian pemimpin lain memindahkan ibukota

negara keluar pulau Jawa sebagai komitmen mengikis Jawa-sentrisme. Faktor terpenting keberanian tersebut adalah karena ia 'adalah' orang biasa' yang tidak memerlukan investasi politik yang dibarengi dengan komitmen kuat menjadikan Indonesia sebagai negara integral-substantif dengan kesejahteraan yang merata sesuai amanat konstitusi. Tentu kritik terhadap pemborosan di tengah krisis yang sedang mengintai dunia banyak di lontarkan kepadanya.

Tantangan selanjutnya pada periode kedua adalah pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) mempersiapkan generasi millennial 'survive' dalam gelombang pasang revolusi industri 4.0. Generasi yang digambarkannya sebagai generasi unggul: berahlak mulia, cerdas, responsif, inovatif membutuhkan 'milliu kebangsaan' untuk menyemainya yaitu ' lingkungan yang moderat, terbuka dan bebas dari resiko (*risk-free*) bagi pertukaran-pertukaran pemikiran, termasuk pemikiran agama. Jokowi memiliki tugas menarik semua ekstrisme: agama, etnis dan pandangan-pandangan lain menuju ke tengah untuk mewujudkan inovasi dan kreatifitas yang dinamis. Salah satunya adalah mendorong moderasi beragama dan Islam wasatiyyat (Islam jalan tengah) yang menjadi jati diri bangsa dan dikawal oleh organisasi arusutama Muhamamdiyah, NU, Nahdlatul Wathon, Persis, al Wasliyah dan sejenisnya. Disinilah Jokowi harus menguatkan organisasi-organisasi tersebut agar dapat menghalau pengaruh skriptualis.

Diatas segalanya, tugas besar Jokowi adalah mengantarkan bangsa ini dari Jawa sentrisme menuju Indonesia sentrisme dengan representasi kebhinekaan yang riil, kehadirannya yang nyata dari Sabang- Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Memastikan

interkoneksi-kebhinekaan melalui infrastruktur serta pemerataan kesejahteraan, pemindahan ibu kota negara. Ditengah tantangan 'alih generasi' dari generasi dengan 'memori' kolonialisme kepada generasi millennial dengan 'impian' globalitas. *Think globally and act locally* benar-benar diperlukan oleh generasi ini dimana orientasi globalnya tidak boleh menceraabut lokalitas mereka-yaitu kebangsaan dan nasionalisme. Itu semua membutuhkan 'macro-culture' moderasi etno, religius, politik dan ekonomi. Jati dirinya sebagai 'orang biasa' diharapkan dapat menangani tugas kebangsaan ini dengan cara 'luar-biasa' seperti biasanya.

Referensi:

BBC News, Sidang Al-Maidah: "Dua Tahun Penjara untuk Ahok, langsung ditahan", 09 Mei 2016.

Benedict, R. Anderson, *Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, USA: New Left Book, 1983.

Deliar, Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, London: Oxford University press, 1973.

Dhakidae, Daniel, "Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa Sebagai Komunitas-komunitas terbayang" dalam, Benedict Anderson, *Imagined Community*, Edisi Indonesia, Yogyakarta: INSIS Press-Pustaka Pelajar, 2001.

Hefner, W. Robert, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*, USA: Princeton University Press, 2000.

-----, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism, Citizenship in Malaysia, Sinagopre and Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 200.

Lee, Hook Guan, Furnivall's Plural Society and Leach's Political System of High Land Burma, *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia* Vol. 24, NO 1, 2009, hal. 32-46.

Marks, Sandra and Andrew Clapham, *International Human Rights Lexicon*, Oxford: University Press, 2005.

Mulder, Niels (2005). *Chapter 3. Javanization, Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*. Kanisius. p. 53. Retrieved 7 November 2013.

Rock, T. Micheal, *Dictators, Democrats and Development in Southeast Asia*, UK: Oxford University Press, 2016.

Thronton, L. David, *Javanization of Indonesian Politics*, Canada: The University of British Colombia, 1972.

United States Bureau of Census, *Celebrating Our Nation's Diversity: a Teaching Suplemment for Grade K-12*, 27 November 2012

Wertheim, W.F, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Keberhasilan Jokowi dalam memenangkan tiap kompetisi, seperti Pilkada Solo (2005 dan 2010), Pilkada DKI Jakarta (2012), serta Pilpres (2014 dan 2019) semakin menjadikannya sebagai politisi yang diperhitungkan oleh banyak pihak. Jokowi juga memberi arti baru atas kajian politik baru di Indonesia.

Fachry Ali menilai bahwa pandangan kekuasaan Jokowi bersifat pasca Jawa (post-Java). Jokowi tidak lagi menggunakan perspektif Jawa dalam menjalankan kekuasaannya, namun melihat Jawa dari sudut Indonesia. Jokowi telah mengubah cara pandang kekuasaan yang sebelumnya selalu Jawa-Sentris menjadi Indonesia Sentris. Hal tersebut terverifikasi ketika Jokowi beberapa kali merayakan hari besar keagamaan di luar Jakarta. Dia pernah natalan di Papua, Idul Adha di Kalimantan Selatan dan Idul Fitri di Sumatera Barat.

Hal tersebut berbeda dengan presiden sebelumnya yang selalu merayakan hari besar keagamaan di ibu kota negara, Jakarta. Dalam pandangan Soemarsaid, konsepsi Jawa memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang sakral, legitimasinya dari "langit", representasi kekuasaan adikodrati. Jokowi tidak lahir dari konsep tersebut. Dia menjadi pemimpin di Solo setelah sebelumnya berjuang untuk melepaskan diri dari persoalan kemiskinan yang dialaminya.

Buku ini merupakan himpunan makalah yang disampaikan para narasumber dalam kegiatan Simposium Jokowi I-III ini dapat memperkaya wacana kebangsaan dalam upaya pendalaman demokrasi yang terus diperjuangkan hingga saat ini.

